

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mary F, Somers Heidhues, 2008, *Timah Bangka dan Lada Mentok*, Jakarta: Yayasan Nabil.
- Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, thafa Media.
- Winarno Surakhmad, 1900, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro.
- E. Utrecht, 1998, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Bambang Yuniarto dkk, 2004, *Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia*, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Puworkerto, Fakultas Hukum Unsoed.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

R.I. Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/ M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Jurnal

Eko Diah Mulyaningsih, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo". *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol 1, No 1, September 2017, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/1909>

Alnoventio Bahtiar, "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Hukum UAJY*, Vol.-, Januari, 2016. <http://e-journal.uajy.ac.id/view/types/thesis.html>

Rina Dian, " Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal/*Illegal Mining* Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Hukum USU*, Vol 1, No 1, Januari, 2017. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/18550/7868>

Muh. Jufri Dewa,"Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,"*Jurnal Sumber Daya Instansi Universitas Muhammadiyah Kendari*, No 15, Edisi Januari 2009.

Webside

Manshur Rizki, *Praktek Pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung Membawa Kerugian Bagi Masyarakat*, 26 Mei 2010,

<https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/26/praktek-penambangan-timah-di-kepulauan-bangka-belitung-membawa-kerugian-bagi-masyarakat/> (01.25)

Rosita, *Evaluasi Kebijakan Penanganan Dampak Pertambangan Timah Rakyat Di Kecamatan Damar Kabupayen Timur*, 15 Juni 2014, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=70176 (20.05)

M. Teuku, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (Study Kasus Dharmasraya Sungailiat dan Tanjung Pandan)*, 2014, <http://repo.unand.ac.id/2589/3/bab%25201.pdf> (20.20)

Dody Prihatman Purba, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan*, <https://www.researchgate.net/publication/42353966> Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan (20.15)

_____, *Kontribusi Tambang Timah Rakyat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Belitung Tahun 1991-2005*, http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_sej_044043_chapter1.pdf (20,07)

Abdul Hamied Razak, *Muncul lagi Penambangan dengan Alat Berat di Lereng Merapi*, 20 Desember 2016, <http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/20/tambang-ilegal-sleman-muncul-lagi-penambangan-dengan-alat-berat-di-lereng-merapi-777989> (23.34)